

Tangerang, 25 Juni 2021
No. 074/IR-CS/BSJ/VI/2021

Kepada Yth.
**OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djodjohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

PT BURSA EFEK INDONESIA
Direktur Utama
Indonesia Stock Exchange Building Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal: Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan dan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT Bumi Serpong
Damai Tbk

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan bukti iklan
sebagaimana yang disampaikan dalam perihal di
atas yang dipublikasikan pada surat kabar harian
Investor Daily pada hari Jumat, 25 Juni 2021.
Mohon dapat diterima dengan baik.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih

Hormat kami/*Best regards*,
PT Bumi Serpong Damai Tbk



Hermawan Wijaya
Direktur/Director

**) unofficial translations*

Tangerang, June 25th, 2021 *)
No. 074/IR-CS/BSJ/VI/2021

Attn.
THE REPUBLIC OF INDONESIA
FINANCIAL SERVICE AUTHORITY
Executive Head of Capital Market Supervisor
Gedung Sumitro Djodjohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.1-4
Jakarta 1070

INDONESIA STOCK EXCHANGE
President Director
Indonesia Stock Exchange Building Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Re: *Submission of Proof of Advertisement
Summary of Minutes of Annual General
Meeting and Extraordinary General
Meeting of Shareholders PT Bumi Serpong
Damai Tbk*

Dear Sir/Sirs,

*We hereby submit softcopy of proof of
advertisement as mentioned above, published in
Investor Daily Newspaper on Friday, June 25th,
2021. Please kindly well received.*

Thank you for your kind attention.

Pemerintah Evaluasi Tambahan Industri Penerima Harga Gas Khusus

Oleh Retno Ayuningtyas

► JAKARTA – Pemerintah masih mengevaluasi tambahan usulan 13 sektor industri untuk mendapatkan harga gas khusus US\$ 6 per juta british thermal unit (*million british thermal unit/mmbtu*). Pemerintah harus memperhatikan kecukupan penerimaan negara dari sektor migas untuk mengakomodasi kebijakan harga gas khusus ini.

Deputi Keuangan dan Monetisasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Arief S Handoko mengatakan, evaluasi atas usulan tambahan industri penerimaan harga gas khusus telah dilakukan oleh pihaknya. Selain itu, pemaparan hasil evaluasi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah dilakukan. Namun, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan atas usulan tersebut terkait volume gas dan kemampuan dari industri itu sendiri. "Contohnya, [industri] pulp and paper, kami sudah bahas, industri ini yang punya konglomerat, masa kita kasih harga murah lagi," kata dia dalam diskusi daring *Efektivitas Harga Gas Dalam Meningkatkan Daya Saing Industri*, Kamis (24/6).

Menurut dia, sesuai Peraturan Presiden No 40 Tahun 2016, penurunan harga gas untuk industri ini harus memperhatikan kecukupan penerimaan negara dari sektor migas. Pasalnya, penerimaan negara ini juga harus bisa mencukupi kompensasi untuk kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) agar tidak terpengang bagian penerimaannya. Apalagi, pemerintah memang sudah menjamin bahwa kebijakan harga

gas ini tidak akan berdampak pada keekonomian kontraktor. "Jadi jangan kaget kalau ada beberapa industri di daerah tertentu yang keekonomiannya tinggi agak susah mendapatkan harga US\$ 6 per mmbtu," tutur Arief.

Sebagai dampak kebijakan harga gas ini, penerimaan negara dari sektor migas disebutkan berkurang US\$ 460 juta. Walaupun angka ini lebih kecil dari proyeksi awal yang mencapai sekitar US\$ 1,39 miliar. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya W Yudha menambahkan, dalam Perpres 121/2020 yang merupakan amandemen Perpres 40/2016 disebutkan bahwa penerimaan bagian negara telah memperhitungkan kewajiban pemerintah kepada kontraktor. Hal ini berarti negara baru akan mengganti selisih harga gas setelah seluruh kewajiban ke kontraktor dituntaskan.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran baru akan dampak kebijakan harga gas ini ke dana bagi hasil (DBH) ke daerah penghasil migas. "Dengan kebijakan ini, kalau penerimaan negara hamper nol, akan berdampak ke DBH," ujarnya. Makanya, lanjut dia, perlu ada evaluasi kebijakan di mana sebagai kompensasinya bisa terjadi relokasi industri ke



Arief S Handoko

daerah sumber gas ini. "Kalau daerah itu berkembang dengan industry baru, maka bisa kompensasi DBH, karena [penerimaan migas] yang dibagi sudah untuk *sacrifice* untuk industri," tambah Satya.

Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Fridy Juwono mengaku telah mengajukan tambahan 13 sektor industri untuk mendapatkan harga gas khusus ke Kementerian ESDM. Usulan ini mencakup harga gas khusus untuk 80 perusahaan dengan volume 129-169 miliar british thermal unit per hari (*billion british thermal unit per day*/BBTUD). Ke-13 sektor industri ini disebutkan belum dapat melengkapi persyaratan di awal ketika pemerintah menawarkan harga khusus.

"Kami juga mempersyaratkan apa yang bisa mereka berikan kalau diberikan US\$ 6 per mmbtu. Kami minta utilisasi naik, efisiensi naik, mereka bisa tunjukkan pembayaran pajak naik, dan yang paling penting investasi bertambah," jelas Fridy.

Belum Optimal

Di sisi lain, SKK Migas mencatat serapan gas harga khusus oleh industri belum optimal. Ariefmemaparkan, sesuai Keputusan Menteri ESDM, tujuh sektor industri memperoleh alokasi gas maksimal 1.205 BBTUD. Realisasi serapan gas ini di tahun lalu tercatat baru sebesar 916,7 BBTUD atau 76% dari alokasi.

"Tentunya rendahnya realisasi pengaliran gas ada beberapa faktor, seperti produksi yang agak menurun, pengaruh pandemi Covid-19, dan juga ada beberapa multisource pada beberapa industri dan memprioritaskan pengambilan dari salah satu badan usaha niaga saja," jelasnya.

Meski demikian, dia mengakui, dampak dari kebijakan harga gas ini sudah dapat dirasakan. Di tahun lalu, tujuh sektor industri ini menyertorkan pajak sebesar Rp 40,09 triliun meski di tengah tekanan pandemi. Sampai triwulan pertama 2021, pajak yang disetorkan tercatat sebesar Rp 10,23 triliun. Selain itu juga terdapat pengurangan subsidi. "Penerimaan pajak dan kontribusi 2021 diharapkan terus meningkat dengan insentif harga gas ini," tutur Arief.

Fridy menambahkan, dari sisi kinerja, utilisasi industri-industri ini sudah meningkat dari 61,1% pada April-Desember 2020 menjadi 60,8% di 2021 ini berkat adanya harga gas khusus. Tak hanya pajak, perbaikan kinerja ini juga membuat volume ekspor industri juga meningkat. Pelaku industri juga dapat menghindari pengurangan pekerjanya kecuali yang telah pensiun.

"Selain itu, terdapat 29 industri dari 176 industri yang telah dapat harga gas khusus, berencana menambah investasi yang nilainya Rp 191 triliun. Artinya, selain tinggkatkan utilisasi, mereka langsung investasi baru karena produksinya sudah cukup bersaing," papar dia. Total terdapat 53 proyek yang akan digarap oleh 29 perusahaan ini.

Terkait serapan gas, disebutkan memang belum optimal di tahun lalu lantaran lantaran terdampak pandemi Covid-19. Namun, sampai April tahun ini, serapan gas oleh industri sudah naik menjadi 954,76 BBTUD atau 79,63% dari alokasi. Ke depannya, serapan gas ini diproyeksikan akan terus meningkat.



Operasional Terhenti Terkendala Pasokan Gas

Suasana pabrik PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang terhenti operasionalnya karena terkendala bahan baku di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, Aceh, Kamis (24/6/2021). PT PIM anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) terpaksa menghentikan operasional pabrik karena terkendala pasokan gas bahan utama pembuatan pupuk dari PT Medco E&P Malaka Blok A, dengan kebutuhan gas 51 MMbtu (million british thermal units) per produksi.

April 2022, Pertamina Siap Pasarkan Solar Euro 4

JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga, *Subholding* Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero), menyatakan siap memasarkan solar dengan standar emisi Euro 4 mulai 1 April 2022. Penerapan standar Euro 4 ini telah ditunda dari seharusnya pada tahun lalu menjadi 2022 lantaran pandemi Covid-19.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat yang digelar Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM bersama Pertamina dan *stakeholder* lainnya, guna mengetahui kesiapan badan usaha migas terkait penerapan aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait Euro 4. Beleid yang dimaksud yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017.

Dalam rapat tersebut, *Manager Product & Service Development* Pertamina Patra Niaga Choerniadi Tomo mengatakan, pihaknya siap memproduksi solar dengan bilangan setana 51 dan kandungan sulfur maksimal 50 ppm dan akan menyalurkan produk dengan menggunakan

saluran distribusi Solar Pertamina Dex.

"Mudah-mudahan bisa siap di 1 April 2022, sesuai dengan keinginan stakeholder bersama," kata dia sebagaimana dikutip dari laman Ditjen Migas, Kamis (24/6).

Dijelaskannya, pasokan Pertamina Dex dengan sulfur maksimal 50 ppm ini akan berasal dari empat kilang, yakni Kilang Dumai, Balikpapan, Balongan, dan Cilacap. Dua kilang diantaranya, yaitu Kilang Dumai dan Balikpapan, ditargetkan bisa mulai memproduksi Pertamina Dex jenis ini pada Agustus 2021 ini. "Kami akan memproduksi sekitar 100 juta barel di masing-masing kilang," tutur Choerniadi.

Selanjutnya, tambah Choerniadi, perseroan akan menambah SPBU yang menjual Pertamina Dex dengan target 2.055 outlet pada 31 Desember 2021. Jumlah ini akan terus ditambah hingga April 2022. Pihaknya juga akan memastikan Pertamina Dex akan tersedia di empat daerah lain yang belum terjangkau, yakni Tarakan, Ternate, Jayapura, dan Ambon. "Kalau masih ada daerah

lain yang belum siap, kami akan kirimkan dalam bentuk kemasan jeriken," ujar dia. Sebaran permintaan Pertamina Dex dari sektor industri dan pelayaran disebutkan akan mengakselerasi perluasan distribusi BBM jenis ini.

Pihaknya juga akan bertahap mengganti isi tangki Pertamina Dex eksisting dengan kandungan sulfur 100-150 ppm menjadi produk sejenis dengan kandungan sulfur lebih rendah. Target perusahaan, pada Maret 2022, seluruh tangki sudah diganti dengan Pertamina Dex Euro 4.

Dalam kesempatan yang sama, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) dan Organda juga siap mendukung penerapan standard Euro 4 untuk kendaraan diesel. Sekretaris Gaikindo Abdul Rochim menuturkan, pihaknya selalu mendukung program pemerintah terkait perbaikan lingkungan.

"Penerapan bahan bakar solar Euro 4 sebaiknya tetap dilaksanakan pada April 2022. Selain kami mempersiapkan unit kendaraan, tentunya perlu mempersiapkan macam-macam lainnya seperti lab uji mesin," kata dia. (ayu)

PLN Kucurkan Rp 20,8 Miliar Terangi 18 Desa Terpencil di NTT

JAKARTA Setelah bencana badai siklon tropis seroja pada April 2021 lalu, PT PLN (Persero) gerak cepat melistriki 18 desa terluar, tertinggal, dan terpedan (3T) di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui program listrik desa. Dengan total investasi Rp 20,8 miliar, sekitar 742 warga di 18 desa tersebut telah menikmati listrik.

Dengan kata lain, PLN menginvestasikan Rp 28 juta untuk melistriki tiap warga di desa tersebut. Tingginya biaya investasi disebabkan lokasi 18 desa yang terisolir.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTT Agustinus Jatmiko menyatakan, pencapaian ini merupakan bentuk komitmen PLN untuk melistriki desa 3T demi mewujudkan energi berkeadilan hingga ke pelosok negeri.

"Sesudah pemulihan pascabencana, PLN kebut melistriki desa-desa dari April hingga pertengahan Juni 2021 telah berhasil melistriki 18 desa tersebar di NTT," ujar Jatmiko. Adapun 18 desa sudah menikmati listrik tersebut tersebar di Pulau Flores yaitu Desa Boafeo, Desa Wologai, Desa Focoloderawe, Desa Nagerawe, di Sumba ada Desa Bolora, di Kalabahi ada Desa Welai Selatan, Desa Tominuku, Desa Fuisama, Desa Malaipea.

Kemudian di Kabupaten Sabu, ada Desa Tada, Desa Bebae, Desa Loborui, Desa Waduwalla, Desa Eikare, Desa Raerobi, Desa Daiano, Desa Matei, dan di Kabupaten TTS, Desa Kaeneno

PLN membangun jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 62,79 kilometer sirkuit (kms), Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 46,09 kms, 18 Gardu dengan kapasitas 900 kVA.

Saat ini, rasio elektrifikasi untuk wilayah NTT mencapai 88,37 persen per Mei 2021 dan rasio desa Berlistrik telah mencapai 96,21 persen per Mei 2021.

Sementara itu, Jatmiko mengaku program listrik desa ini membutuhkan sinergi dan kerja ekstra, terutama dalam hal pengangkutan tiang ke lokasi karena medan yang cukup sulit. Sebagian material itu dibawa secara manual dibantu warga desa setempat. "Kami ucapkan terima kasih kepada warga yang sudah dengan sukarela membantu kami," ungkapnya.

Jatmiko juga mengapresiasi dukungan penda dan penunjang pemerintah daerah khususnya pada kemudahan perizinan pembangunan serta saat penarikan kabel dan penentuan lokasi gardu dapat berjalan dengan lancar. Mewakili masyarakat, Camat Alor Tengah Utara, Sabdi Mankanlehi bersyukur atas mengalirnya listrik di wilayahnya. Penantian panjang puluhan tahun, akhirnya berubah manis.

"Akhirnya setelah proses yang panjang, masyarakat di sini bisa menikmati listrik dan berharap bisa dimanfaatkan dengan baik oleh warga sehingga lebih meningkatkan roda ekonomi masyarakat," ungkapnya. (rap)

BSDCITY BIG CITY, BIG OPPORTUNITY			
PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN TANGERANG PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020			
Direksi PT Bumi Serpong Damai Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, yang diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Convention Center, Lantai 1, Ruang Garuda 6 AB, Jl. BSD Grand Boulevard Raya No. 1, BSD City, Tangerang 15345 (selanjutnya disebut "Rapat"), adalah sebagai berikut:			
Agenda 1 dari Rapat	1. menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020;	2. mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Samsi Idris, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00036/2.1090/AU.1/03/0148-2/11/2021 tanggal 15 Maret 2021, dengan pendapat "Wajar";	3. mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020; dan
	4. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>"acquit et decharge"</i>) kepada:	(i) Para anggota Direksi Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar Pengadilan; dan	(ii) Para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta pemberian nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan, yang dijalankan selama tahun buku 2020, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2020.
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Keputusan Rapat	15.948.468.761 suara (99,90%)	3.446.900 suara (0,02%)	12.515.000 suara (0,08%)
Agenda 2 dari Rapat	Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020, yaitu sebesar Rp281.700.888.867,- (dua ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:		
	a. sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah), disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 84 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;		
	b. sisanya sebesar Rp279.700.888.867,- (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Keputusan Rapat	15.964.430.361 suara (99,999998%)	Nihil	300 suara (0,000002%)
Agenda 3 dari Rapat	1. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;		
	2. a. menetapkan total gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 adalah minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2020; dan		
	b. memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Keputusan Rapat	15.761.662.439 suara (98,73%)	202.765.922 suara (1,27%)	2.300 suara (0,00%)
Agenda 4 dari Rapat	Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan Kantor Akuntan Publik independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 dengan kriteria sebagai berikut:		
	a. Termasuk Kantor Akuntan Publik ("KAP") yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK");		
	b. Memiliki pengalaman melakukan audit di Perseroan terbuka.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Keputusan Rapat	15.423.537.308 suara (99,61%)	540.891.053 suara (3,39%)	2.300 suara (0,00%)
Tangerang, 25 Juni 2021 PT Bumi Serpong Damai Tbk Direksi			

BSDCITY BIG CITY, BIG OPPORTUNITY			
PT BUMI SERPONG DAMAI Tbk BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN TANGERANG PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA			
Direksi PT Bumi Serpong Damai Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, yang diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Convention Center, Lantai 1, Ruang Garuda 6 AB, Jl. BSD Grand Boulevard Raya No. 1, BSD City, Tangerang 15345 (selanjutnya disebut "Rapat"), adalah sebagai berikut:			
Agenda 1 dari Rapat	1. Menyetujui penyesuaian pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:		
	- Pasal 11 tentang Rapat Umum Pemegang Saham;		
	- Pasal 12 tentang RUPS Tahunan;		
	- Pasal 13 tentang RUPS Luar Biasa;		
	- Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 tentang Permintaan penyelenggaraan RUPS;		
	- Pasal 18 tentang Tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS;		
	- Pasal 19 dan Pasal 20 tentang Pemberitahuan penyelenggaraan RUPS;		
	- Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 tentang Pengumuman penyelenggaraan RUPS;		
	- Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 tentang Pemanggilan Penyelenggaraan RUPS;		
	- Pasal 30 dan Pasal 31 tentang Hak Pemegang Saham;		
	- Pasal 32 tentang Kehadiran pihak lain dalam RUPS;		
	- Pasal 33 dan Pasal 34 tentang Pimpinan RUPS;		
	- Pasal 35 tentang Tata Tertib RUPS;		
	- Pasal 36 tentang Keputusan RUPS;		
	- Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 tentang Kuorum Kehadiran RUPS dan kuorum keputusan RUPS;		
	- Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 tentang Risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS;		
	Menjadi pasal 11 sampai dengan pasal 47 sebagai hasil penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimuat dalam POJK No.15/2020 dan POJK No.16/2020 dan perubahan-perubahannya sehubungan dengan adanya penyesuaian tersebut.		
	2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan Keputusan Rapat ini dalam akta Notaris dan mengajukan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; mengajukan dan menyampaikan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan (SPP-PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Keputusan Rapat	14.839.647.715 suara (91,59%)	1.362.187.946 suara (8,41%)	2.000 suara (0,00%)
Dengan suara terbanyak atau suara 14.839.647.715 (91,59%)			
Agenda 2 dari Rapat	Terhitung sejak ditulangnya Rapat ini:		
	1. a. menerima baik pengunduran diri Bapak Petrus Kusuma dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>"acquit et decharge"</i>) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya selama menjabat, sepanjang tindakan tersebut sesuai atau tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan;		
	b. menyetujui untuk mengangkat Bapak Ir. Siswanto Adisaputro selaku Direktur Perseroan untuk sisa masa jabatan anggota Direksi yang menjabat saat ini. Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditulangnya Rapat ini sampai dengan ditulangnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-merek) sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya (-merek) berakhir, adalah sebagai berikut:		
	Direksi:		
	Presiden Direktur : Francisus Xaverius R.D.;		
	Wakil Presiden Direktur : Michael Jackson Purwanto Widjaja;		
	Direktur : Lie Jani Harjanto;		
	Direktur : Syukur Lawigena;		
	Direktur : Hermawan Wijaya;		
	Direktur : Liauw, Herry Hendarta;		
	Direktur : Monik William;		
	Direktur : Ir. Siswanto Adisaputro.		
	Dewan Komisaris:		
	Presiden Komisaris : Muktar Widjaja;		
	Wakil Presiden Komisaris : Tedy Malioa;		
	Komisaris : Yoseph Francisus Bonang;		
	Komisaris Independen : Teddy Pawitra;		
	Komisaris Independen : Susiyati Bambang Hirawan.		
	2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan Keputusan Rapat ini dalam akta Notaris dan mengajukan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.		
Jumlah pemegang saham yang bertanya	tidak ada/nihil		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Keputusan Rapat	14.369.447.151 suara (88,69%)	1.379.154.458 suara (8,51%)	453.236.052 suara (2,80%)
Dengan suara terbanyak atau suara 14.822.683.203 suara (91,49%)			
Tangerang, 25 Juni 2021 PT Bumi Serpong Damai Tbk Direksi			